

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

**Studi: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat**

TESIS



OLEH:

**A. FERNANDOS
NIM. 2420811002**

**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

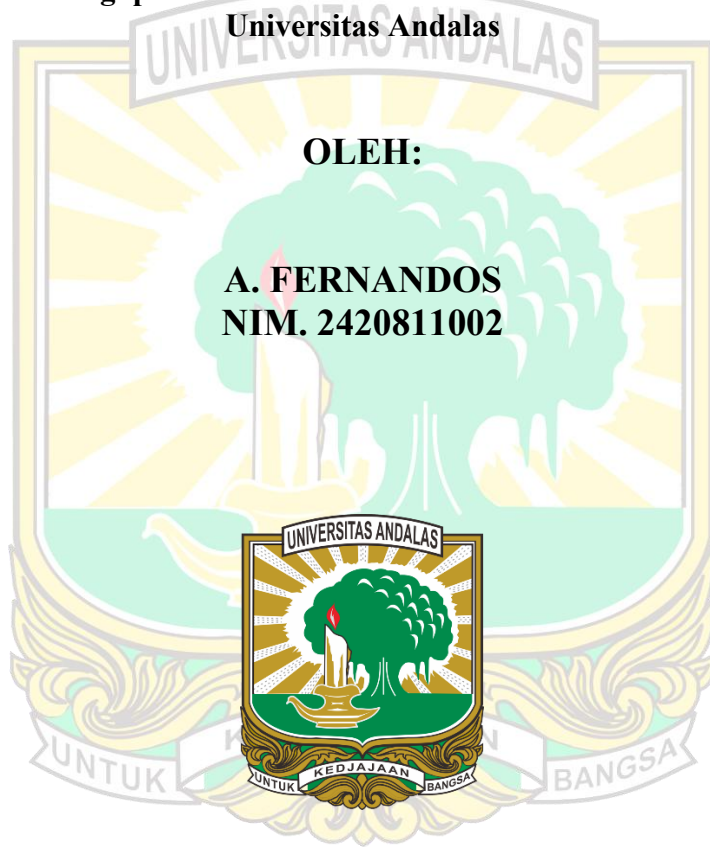
**Studi: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas**

OLEH:

**A. FERNANDOS
NIM. 2420811002**



**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

ABSTRAK

Nama : A. Fernandos
Program Studi : Magister Sosiologi
Judul Tesis : Implementasi Prinsip-Prinsip Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan (Studi: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat)

Kekerasan pada perempuan menuntut perhatian serius semua pihak, terutama pemerintah. Sebagai upaya perlindungan bagi korban, pemerintah merumuskan berbagai kebijakan, salah satunya dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) melalui Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018. Sebagai wujud pelaksanaan kebijakannya, pemerintah daerah, termasuk Sumatera Barat, mendirikan UPTD PPA, termasuk UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat yang berkewajiban langsung menangani kasus kekerasan pada perempuan di wilayahnya. Namun, dalam praktiknya terdapat persoalan, yaitu kesesuaian antara pelaksanaan layanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan oleh UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat dengan prinsip-prinsip perlindungan yang ditetapkan dalam kerangka hukum nasional. Riset ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan implementasi prinsip-prinsip perlindungan oleh UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat bagi perempuan korban kekerasan; dan (2) mengidentifikasi kendala yang dihadapi UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan tersebut. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe feminis dan hermeneutika arkeologi Michel Foucault. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Informan riset terdiri dari 10 orang, yakni 5 orang petugas UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat dan 5 orang perempuan korban kekerasan yang pernah menerima layanan lembaga tersebut. Analisis data dengan model Miles dan Huberman, meliputi pengkodean data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil riset menunjukkan bahwa implementasi prinsip nondiskriminasi telah memasuki kondisi ideal. Sementara itu, implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kesetaraan gender, pemulihan, perlindungan dari kekerasan berulang, dan partisipasi korban secara umum belum mendekati kondisi ideal. Di sisi lain, prinsip kerahasiaan sudah pernah terjadi pelanggaran akibat kelalaian dalam menjaga data korban. Adapun kendala dalam implementasi prinsip-prinsip perlindungan terbagi menjadi kendala internal dan eksternal. Kendala internal mencakup kesulitan pendekatan awal dengan korban, sulit menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan korban, sulit membangun kepercayaan korban, dilema pemberian pendampingan, pendampingan belum berkelanjutan, serta kurangnya kesepahaman internal. Kendala eksternal meliputi akses sulit ke wilayah terpencil, proses penanganan yang kompleks dan lama, kurangnya kesepahaman dengan *stakeholder*, resistensi sosial, dan kesulitan korban dalam berkomunikasi.

Kata Kunci: Kekerasan pada Perempuan, Perlindungan Perempuan, UPTD PPA, Implementasi Prinsip-Prinsip Perlindungan

ABSTRACT

Name : A. Fernandos
Study Program : Master of Sociology
Thesis Title : Implementation of Protection Principles for Women Victims of Violence (Study: Regional Technical Implementation Unit for Women and Children Protection (UPTD PPA) of West Sumatra Province)

Violence against women requires serious attention from all parties, especially the government. As an effort to protect victims, the government has formulated various policies, one of which is the establishment of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) through PPPA Ministerial Regulation Number 4 of 2018. As a form of implementing its policies, regional governments, including West Sumatra, have established UPTD PPA, including the UPTD PPA of West Sumatra Province which is directly responsible for handling cases of violence against women in its area. However, in practice there are problems, namely the suitability between the implementation of protection services for women victims of violence by the UPTD PPA of West Sumatra Province with the principles of protection set out in the national legal framework. This research aims to: (1) describe the implementation of protection principles by the UPTD PPA of West Sumatra Province for female victims of violence; and (2) identify the obstacles faced by the UPTD PPA of West Sumatra Province in implementing these protection principles. This research uses a qualitative approach of the feminist type and Michel Foucault's archaeological hermeneutics. Data collection through in-depth interviews, observation, and document studies. Research informants consisted of 10 people, namely 5 UPTD PPA officers of West Sumatra Province and 5 female victims of violence who had received services from the institution. Data analysis using the Miles and Huberman model, including data coding, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study indicate that the implementation of the principle of non-discrimination has entered an ideal condition. Meanwhile, the implementation of the principle of best interests for victims, justice, gender equality, recovery, protection from repeated violence, and victim participation in general has not approached the ideal condition. On the other hand, the principle of confidentiality has been violated due to negligence in maintaining victim data. The obstacles in implementing the principles of protection are divided into internal and external obstacles. Internal obstacles include difficulties in the initial approach to victims, difficulties in adjusting the approach to the needs of victims, difficulties in building victim trust, dilemmas in providing assistance, assistance has not been ongoing, and lack of internal understanding. External obstacles include difficult access to remote areas, complex and long handling processes, lack of understanding with stakeholders, social resistance, and difficulties for victims in communicating.

Keywords: Violence against Women, Protection of Women, UPTD PPA, Implementation of Protection Principles